

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kuncoro, 09 Juni 2014, 10 Materi Yang Harus Dipahami Oleh Pengelola Keuangan Negara, <http://star.bpkp.go.id/berita/21/10-materi-yang-harus->
- Akbar, Bahrullah dkk, Akuntabilitas Daerah : Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya Dalam Rangka Otonomi Daerah, <https://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/akuntabilitas-daerah-tinjauan-pemikiran-pelaksanaannya-dalam-rangka-otonomi-daerah/> diakses tanggal 1 November 2017
- Akbar, Bahrullah, Reformasi Keuangan Daerah Masih Kesulitan <https://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/reformasi-keuangan-daerah-masih-kesulitan/>, diakses tanggal 1 November 2017
- Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Anita hidayanti, 2014 Definisi dan Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana <http://anitahidayantii.blogspot.co.id/2014/09/definisi-dan-ruang-lingkup-sarana-dan-dan.html> diakses tanggal 1 November 2017
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah desa" Bandung: Fokusmedia
- BPKP, 19 November 2013 Reformasi UU Keuangan Negara Untuk Transparansi dan Akuntabilitas, Dikutip dari <http://www.bpk.go.id/news/reformasi-uu-keuangan-negara-untuk-transparansi-dan-akuntabilitas> diakses tanggal 1 November 2017
- Burhan, Bungin, 2011 Metodologi Penelitian Kuantitatif, Surabaya: Prenada Media,
- Dadang kurnia, Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, Jakarta; BPKP, 2015 Dadang Kurnia 2015 dikutip dari <http://www.bpkp.go.id/publik/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesapdf>
- Deni Darmawan 2013 Metodologi *Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Diakses tanggal 1 November 2017 [dipahami-oleh-pengelola-keuangan-negara10](http://www.bpkp.go.id/publik/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesapdf)
- Hanif Nurcholis, 2011, "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" Jakarta: Penerbit Erlangga Ilmu, 2013
- Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008

- Kaswan, 2012 *Coaching dan Mentoring untuk pengembangan SDM dan peningkatan organisaasi*, Bandung;Alfabeta,
- Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparans dan partisipasi. Jakarta : Sekertariat Good Publik Governmance, Badan Perencanaan Pengembangan Nasional.
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui*
- Penny Kusumawati Lukito, 2014 “Membumikan Trasnparansi dan Akuntabilitas Kinerja sektor Publik Tantangan berdemokrasi ke depan” Jakarta: PT. Grasindo
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
- Risya Umami, Idang Nurodin 2017, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Universitas Muhammadiyah Sukabumi Vol. 6 Edisi 11
- Sabrina rizkita http://kedesa.id/id_ID/akuntabilitas-pemerintah-desa/Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negerinomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatandan belanja daerahtahun anggaran 2015
- Salle, Agustinus, 2008, Reformasi keuangan Daerah, <http://asalle.blogspot.co.id/2008/03/reformasi-keuangan-daerah.html> diakses tanggal 1 November 2017
- Sapto Hendri BS, Ni Putu Chandra Ayu Ardana , Intan Rakhmawati, Siti Atikah, 2016 Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah, Universitas Tarumanagara
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV MandarMaju.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsumi, Arikunto 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suputra, I Wayan Nike, 2016, Akuntabilitas Pemerintah Desa,
[http://pattiro.org/2016/03/akuntabilitas-pemerintah-desa/Diakses tanggal 2 November 2017](http://pattiro.org/2016/03/akuntabilitas-pemerintah-desa/Diakses_tanggal_2_November_2017)

Sutriyono, Edy, 2017 Bendahara Desa Tahunan Ditahan Kejari Jepara
<http://www.murianews.com/2017/01/10/105249/bendahara-desa-tahunan-ditahan-kejari-jepara.html> Diakses tanggal 12 desember 2017

Tony Wijaya, , Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Graha

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Permendagri Nomor 113 tahun 114 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Wijaya, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/ Marga: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu telaah Administrasi Negara). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirawan, evaluasi kinerja sumber daya manusia teori dan aplikasi dan penelitian, Yogyakarta; Salemba, 2012

Yulida Medistiara, Jumat 11 Agustus 2017, “ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa”,
<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa> Diakses tanggal 2 November 2017

Yustika, ahmad erani, 2017
http://kompak.or.id/userfiles/publikation/download/Buku_Sarana_Prasarana_Desa.pdf tanggal 2 November 2017

Zulfikar, M. Fiekri S., 2014 Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaan laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) universitas widyatama